

# **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI DI DESA RANTAU LAYUNG KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER**

**Immanuel Agung Pamuji<sup>1</sup>**

## *Abstract*

*Pemberdayaan perempuan Indonesia maju mandiri di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tahun 2012 telah berjalan sebagaimana mestinya dalam memberdayakan perempuan dengan mengolah hasil alam membuat anyaman-anyaman dari rotan menjadi tas, dompet dan ranjung, dalam meningkatkan perekonomian perempuan.*

*Keywords : Pemberdayaan Perempuan*

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman baik budaya, suku dan agama. Dengan adanya keanekaragaman tersebut, pemerintah sebagai pelaksana mempunyai komitmen dalam upaya meningkatkan peran dan kedudukan perempuan, dimana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Komitmen pemerintah terhadap upaya pemberdayaan perempuan telah dimulai sejak tahun 1978 yang diawali dengan konsep Women in Development (WID) atau peran perempuan dalam pembangunan. Pendekatan dengan menggunakan konsep Women in Development belum mampu membawa kemajuan yang berarti bagi perempuan sehingga hasil yang diperoleh dengan konsep ini belum begitu optimal bagi pengembangan dan kemajuan Pemberdayaan Perempuan dalam segala bidang.

Kemiskinan yang dialami perempuan merupakan gambaran kualitas hidup perempuan yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap berbagai sumber daya pembangunan dan masih kentalnya budaya masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan. Kenyataan ini menyebabkan kondisi dan posisi perempuan dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan menjadi tertinggal.

Untuk mendorong peningkatan kemampuan perempuan dalam mengentaskan kurang berdayanya perempuan umumnya pada khususnya memerlukan penanganan secara struktural karena berbagai masalah penyebab kurang berdayanya perempuan terkait dengan berbagai faktor penyebab yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: immanuelagungpamuji@gmail.com

belum dapat diatasi secara mandiri dan parsial melainkan melalui program-program pembangunan secara menyeluruh.

Permasalahan perempuan dibidang ekonomi tidak terlepas dari kekurangan, yang akan berdampak kepada kualitas kesehatan rendah, dan akibatnya mobilitas dan aktivitas individu ataupun kelompok menjadi rendah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun tingkat produktivitasnya.

Hal ini menyebabkan kemampuan untuk membiayai anak sekolah menjadi rendah, kualitas kesehatan keluarga kurang terpenuhi, untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan Indonesia dibidang ekonomi melalui program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) menjadi salah satu prioritas kementerian pemberdayaan perempuan sejak tahun 2002, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di samping kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak. PPEP merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan pemenuhan hak ekonomi perempuan.

Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif, peran perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga. PPEP dimaksudkan untuk mendapatkan akses terhadap informasi, sumber-sumber produksi pembiayaan, permodalan dan peluang pasar agar mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, mengintensifkan upaya untuk mengarusutamakan dan memfokuskan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama disektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

PPEP di tumbuh kembangkan sebagai salah satu kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan melalui koordinasi lembaga/instansi terkait yang memiliki program/kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.

Sebab itu peningkatan kualitas SDM perempuan (wawasan, pengetahuan, keterampilan, hingga etos kerja), penumbuh kembangan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, dan pasar), memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi mikro, serta mengembangkan kemitraan usaha yang paling menguntungkan menjadi sangat penting. Melalui kebijakan ini diharapkan akan memungkinkan berkembangnya potensi kaum perempuan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Pertimbangan penetapan prioritas ini berkaitan dengan keluarga kurang mampu diseluruh dunia yang senantiasa berdampak kepada perempuan dan

anak. Selain itu dengan adanya kesepakatan Millenium Development Goals (MDG), Indonesia dituntut untuk mengurangi jumlah keluarga kurang mampu.

Program pembentukan desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) akan lebih dikembangkan sebagai model pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk melibatkan seluruh masyarakat untuk membangun desa, menanggulangi keluarga kurang mampu bagi masyarakat desa, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Salah satu misi dari pembangunan Kalimantan Timur yang dicantumkan dalam RPJMD 2009-2013 adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi. Namun demikian, untuk menciptakan kondisi tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki serta masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Oleh karena itu kualitas hidup perempuan menjadi sangat penting untuk diangkat. Karena peningkatan kualitas hidup perempuan dapat meningkatkan kualitas anak-anak yang dilahirkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang. Sebaliknya jika rendahnya kualitas hidup perempuan akan beresiko terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun intelegensianya yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang lemah. Hal ini terasa semakin penting ditengah persaingan antar bangsa pada era globalisasi.

Dengan dimasukkannya sasaran peningkatan kualitas hidup perempuan yang ingin dicapai dalam pembangunan, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan. Pengembangan model desa Prima sebagai bagian dari kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) mendorong upaya peningkatan pemberdayaan perempuan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat yang secara bersama-sama bersinergi, memfokuskan program kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) disebut juga desa percontohan untuk menanggulangi keluarga kurang mampu melalui upaya ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian untuk keluar dari kekurangan kemampuan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan desa Prima, khususnya bagi kelompok perempuan kurang mampu menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumber daya manusianya, kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usahanya.

Kabupaten Paser adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten Paser ini terletak di Tanah Grogot. Kabupaten Paser

merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, batas wilayah Kabupaten Paser sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selat Makasar.

Menurut Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa di Kabupaten Paser di akui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (KPPKB) Paser yang bekerja sama dengan BPPKB Kalimantan Timur menggelar pertemuan, yang bertujuan membentuk desa Prima.

Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk menentukan lokasi yang akan di jadikan model desa Prima, target sasarannya adalah desa tertinggal dan dengan lokasi yang secara geografik terisolasi, tetapi memiliki banyak sumber daya alam (SDA) yang memadai.

Prinsipnya pelaksanaan desa Prima bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan khususnya dalam produktivitas ekonomi perempuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) adalah suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah untuk ikut membangun desa Prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, sekaligus menanggulangi kekurangan kemampuan desa.

Perempuan di desa Rantau Layung hampir keseluruhan dalam keseharian mereka, mereka bekerja di kebun/berladang mengikuti kerja suami/keluarga mereka dalam membantu penghasilan untuk ekonomi keluarga. Perempuan di desa Rantau Layung juga memiliki pendidikan yang masih kurang, jarak desa Rantau Layung juga jauh berada di pedalaman. Pemerintah Kabupaten Paser telah melihat kondisi desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser bahwa desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser memiliki potensi sumber daya alam yang bisa di manfaatkan yang mampu memberikan penghasilan terhadap perempuan-perempuan di desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam pelatihan kerja Desa PRIMA.

Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser menurut pertimbangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser desa Rantau Layung ditetapkan pada tanggal 25 januari 2012 menjadi desa perempuan Indonesia maju mandiri (Prima) di Tana Paser. Kegiatan yang dilakukan desa Prima ini

mengembangkan ketrampilan dalam membuat anyaman-anyaman serta pelatihan kerja untuk mengembangkan ketrampilan dalam menggali sumber daya alam dan manusianya, yang paling menonjol desa Prima ini pembuatan anyaman-anyaman, hal seperti ini lah yang dapat membuka peluang usaha bagi perempuan-perempuan di desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

## **Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :

- a) To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan.
- b) To give power of authority to, yang berarti memberi tenaga/kekuasaan.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan dapat diawali dengan memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atau tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menurut Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai

kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Pengertian pemberdayaan adalah menempatkan pekerja untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas. Pengertian lain menyatakan pemberdayaan adalah setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.

Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan dan berkemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan dan kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses seorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons, etal., 1994:106) dalam (<http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo 32.htm>).

Rappaport (dalam Hikmat 2004:3) dikatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya. Sementara MacArdle (dalam Hikmat 2004:3) diartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan itu. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta

sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Menurut Ife (dalam Suharto 2005:59) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan klien. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Prijono dan pranarka (dalam Sulistiyani 2004:78) menyatakan pemberdayaan mengandung dua arti yaitu :

- a) Pemberdayaan adalah to give power or authotiry (memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya).
- b) Pemberdayaan adalah to give ability to or enable (memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu).

Sedangkan menurut Pranarka, Sumodiningrat (dalam Sulistiyani 2004:78) menyampaikan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan empowerment dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberikan “daya” bukanlah “kekuasaan”. Empowerment dalam khasanah barat bernuansa “pemberian kekuasaan“ dari pada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan “memberi energy”. Pemberdayaan adalah memberi energy agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistiyani 2004:83) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian di lepas untuk mandiri, meski jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka

menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Ambar teguh Sulistiyani (2004:79) berpendapat pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya juga menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Agar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah :

- a) Daya difahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- b) Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Sedangkan menurut Winarni (dalam Sulistiyani 2004:79) pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), meperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptaya kemandirian. Bertolak dengan pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

## **2. Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Secara alamiah perempuan akan menjadi pendidik pertama dan utama, maka harus diupayakan agar ditingkatkan kualitasnya, diberi dorongan agar perempuan lebih berdaya dan mandiri. Keberhasilan pemberdayaan perempuan bukannya harus bekerja diluar rumah tetapi ia harus menjadi perempuan yang mandiri, kedepannya bisa mendidik anak dengan wawasannya yang luas. Jika ia berkarir maka ia mampu menjalankan peran perempuan dengan seimbang.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.

Aspek pengembangan sumber daya manusia dijadikan salah satu komponen. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka



pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh perempuan, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia terutama perempuan adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dilapisan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan perempuan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada perempuan agar menjadi berdaya, mendorong/memotivasi setiap individu mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan perempuan ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memandirikan perempuan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Dalam pedoman pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup (2006:8-9), pemberdayaan adalah serangkaian upaya-upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan secara serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan agar perempuan dapat mengatur dirinya untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam pedoman pemberdayaan sosial perempuan (2006:4), pemberdayaan perempuan adalah serangkaian program dan kegiatan yang sebagai pemberian kepercayaan dan kewenangan untuk memperkuat motivasi, kemampuan dan peran ganda perempuan melalui penyadaran pemberdayaan perempuan, pengembangan kapasitas perempuan, intervensi pemberdayaan perempuan, program aksi pemberdayaan perempuan dan media pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **3. Landasan Hukum**

Dalam melaksanakan model desa PRIMA dilandasi dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-undang dasar 1945 pasal 18A, 18B, 27, 28, 28A, 28C, 28F, 28H, 33 dan 34.
- 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembar Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor 3277).

- 4) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 5) Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant oneconomic, social and cultural rights.
- 8) Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights.
- 9) Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenanganpropinsi sebagai daerah otonom.
- 10) Peraturan presiden RI nomor 7 tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka menengah(RPJM).
- 11) Peraturan presiden RI nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri Negara.
- 12) Peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- 13) Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- 14) Peraturan bersama menteri Negara pemberdayaan perempuan, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan nasional nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, nomor 28A tahun 2005,nomor 1/PB/2005 tentang percepatan pemberantasan buta aksara perempuan.
- 15) Keputusan menteri pemberdayaan perempuan nomor 58 tahun 2004 tentang kebijakan dan strategis peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
- 16) Pereturan menteri Negara pemberdayaan perempuan RI nomor P.01/MENEG.PP/V/2005 tentang organisasi dan tatak erja kementerian Negara pemberdayaan perempuan.

### **Gambaran Umum Desa Rantau Layung**

Desa Rantau Layung adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang letak daerahnya berada sekitar 180 km dari Ibukota Kabupaten Paser yaitu Tanah Grogot. Desa Rantau Layung dikelilingi oleh hutan dan dilintasi oleh dua sungai besar yaitu Perayan dan Kesungai.Keseluruhan di Desa Rantau Layung suku etnis

Paser. Suku Paser merupakan bagian dari suku Dayak, terutama Dayak Benua sebab keduanya memiliki kemiripan dalam bahasa. Di daerah dataran, dan pegunungan serta sungai. Secara Administratif Desa Rantau Layung berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Long Gelang.
2. Sebelah Timur : Desa Lombok.
3. Sebelah Selatan : Desa Rantau Buta.
4. Sebelah Barat : Desa Uko.

Luas Desa Rantau Layung adalah 189,13 Ha, dengan luas pemukiman penduduk 9,62 Km<sup>2</sup>, luas perkuburan 500 M, perkantoran 12 M, Luas prasarana umum lainnya 500 M.

Luas wilayah menurut penggunaan, untuk jalanan 30 Km<sup>2</sup>, perkebunan dan pertanian 18,914 Ha.

Terbentuknya Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), di Desa Rantau Layung dalam Pemberdayaan Perempuan menurut pengakuan Kepala Desa. Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser didatangi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Paser, pihak Pemerintah Kabupaten Paser melihat secara langsung kondisi Desa Rantau Layung.

Pemerintah Kabupaten melihat beberapa hasil sumber daya alam yang telah dibuat oleh perempuan-perempuan di Desa Rantau Layung yang mengolah rotan dijadikan tas untuk menggendong hasil panen pertanian/perkebunan warga Desa Rantau Layung, berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan Desa Rantau Layung, pihak Pemerintah Kabupaten telah melakukan sosialisasi akan program/kegiatan Desa Prima dan selanjutnya menetapkan Desa Prima di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam memberdayakan perekonomian perempuan.

Kepala Desa Rantau Layung sebagai tokoh penting dalam kegiatan/program Desa Prima, sebagai tokoh penting Kepala Desa memperhatikan kebutuhan perempuan yang kurang mampu dan kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh. Kepala Desa Rantau Layung adalah sebagai pengawas dalam Desa Prima di Desa Rantau Layung dan dalam rangka pembangunan Desa Prima yang sesuai dengan potensi dan keinginan masyarakat Desa Rantau Layung.

Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) sebagai laboratorium bagi instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan sinergi pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dalam rangka penanggulangan keluarga kurang mampu. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan pada pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, tapi juga mensinergikan program-program dari berbagai aspek yang diperlukan di wilayah desa Rantau Layung.

## **Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser**

Terbentuknya Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), di Desa Rantau Layung dalam Pemberdayaan Perempuan menurut pengakuan Kepala Desa. Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser didatangi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Paser, pihak Pemerintah Kabupaten Paser melihat secara langsung kondisi Desa Rantau Layung.

Pemerintah Kabupaten melihat beberapa hasil sumber daya alam yang telah dibuat oleh perempuan-perempuan di Desa Rantau Layung yang mengolah rotan dijadikan tas untuk mengendong hasil panen pertanian/perkebunan warga Desa Rantau Layung, berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan Desa Rantau Layung, pihak Pemerintah Kabupaten telah melakukan sosialisasi akan program/kegiatan Desa Prima dan selanjutnya menetapkan Desa Prima di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam memberdayakan perekonomian perempuan.

Sumber pendanaan dalam pelatihan kerja pemberdayaan perempuan Indonesia maju mandiri di Desa Rantau Layung 66 juta rupiah pertahun dengan usulan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dari Pemerintah Kabupaten Paser melalui dana APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) dan Keluarga Berencana (KB).

Desa PRIMA dalam pemberdayaannya prinsipnya pelaksanaan desa tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan khususnya dalam produktivitas ekonomi perempuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusianya.

Selain untuk mewujudkan kesejahteraan juga menciptakan kesempatan kerja khususnya bagi perempuan Desa Rantau Layung. Partisipasi kaum perempuan meliputi keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang mereka laksanakan hingga pengambilan keputusan dalam pelaksanaan usaha itu sendiri.

### **1. Pelatihan Kerja**

Pelatihan Kerja yang meliputi Pengelolaan Rotan Pemberdayaan perempuan, membuat anyaman dari rotan bermotif tulisan, membuat anyaman bermotif gambar, membuat dompet dan tas dari anyaman rotan di Desa Rantau Layung dalam pemberdayaan perempuan Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan sumber daya alam yang terlihat maju yang telah di manfaatkan/dikelola oleh masyarakat di Desa Rantau Layung khususnya

perempuan yang telah diberdayakan, dengan adanya Desa Prima ini akan menambah rasa kepercayaan diri dalam meningkatkan ekonomi perempuan.

Tabel 1

Daftar Hasil Produksi Beserta Harga Produksi Desa Prima Tahun 2012.

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1.	Tas Besar	1	Rp. 250.000
2.	Tas Kecil	1	Rp. 150.000
3.	Dompet Besar	1	Rp. 250.000
4.	Dompet Kecil	1	Rp. 150.000
5.	Ranjung	1	Rp. 200.000

Sumber : Data di Olah Desa Prima.

Dalam waktu satu minggu desa Prima mampu menghasilkan 17-19 hasil produksi, dari 31 pemberdayaan perempuan, produksi desa Prima yang sudah terpasarkan adalah tas, dompet, dan ranjung berbagai macam ukuran, dalam hitungan hasil produksi desa Prima yang terjual, desa Prima saat ini mampu menjual dalam satu minggu menjual 4-6 barang hasil produksi desa Prima.

Pemberdayaan perempuan di Desa Rantau Layung dalam pelatihan pembuatan anyaman dalam sebulan 8 kali, dalam hitungan dari bulan Januari sampai pada Agustus tahun 2012 pemberdayaan perempuan Indonesia maju mandiri terhitung 64 kali dalam pelatihan kerja.

## **2. Pendidikan dan Keterampilan**

Pendidikan dan Keterampilan yang meliputi Pembelajaran membuat motif yang baru, keterampilan dalam mengolah hasil alam di Desa Rantau Layung dalam pemberdayaan perempuan Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pembelajaran mengelola motif-motif yang baru untuk membuat tertarik para konsumen untuk memilih hasil produksi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.

## **3. Pelibatan Keluarga/suami dalam pelaksanaan Desa Prima**

Pelibatan Keluarga/Suami dalam kegiatan Desa Prima yang meliputi peningkatan dalam kebersamaan, gotong royong, akses terhadap pemasaran, hasil produksi Desa Prima, produksi Desa Prima yang terpasarkan di Desa Rantau Layung dalam Pemberdayaan Perempuan Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan bergotong royong serta berbagai ukuran telah terselesaikan dalam pemberdayaan perempuan, dalam waktu satu minggu Pemberdayaan Perempuan menghasilkan 17-19 hasil produksi Pemberdayaan Perempuan.

#### **4. Faktor Pendukung**

Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri meliputi Kemampuan individu, Dukungan Pemerintah, serta hasil produksi Pemberdayaan Perempuan memiliki ketahanan yang bagus (awet) memang sudah terbukti dan teruji dalam produksi Pemberdayaan Perempuan, rotan adalah bahan yang awet/berkualitas.

#### **5. Faktor Penghambat**

Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri meliputi susahny jaringan telepon, memiliki jarak tempuh yang jauh, tidak adanya listrik, barang hasil produksi Desa Prima bersaing dengan harga-harga produk tas dan dompet yang sudah ada dipasaran, berdasarkan hal tersebut pemberdayaan perempuan harus bekerja dalam pelatihan kerja memaksimalkan hasil produksi/olahan pemberdayaan perempuan guna mampu bersaing, menjaga kualitas hasil produksi Desa Prima.

#### **Kesimpulan**

Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser menurut pertimbangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser Desa Rantau Layung ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2012 menjadi desa perempuan Indonesia maju mandiri (Prima) di Tana Paser.

Kegiatan yang dilakukan Desa Prima ini mengembangkan ketrampilan dalam membuat anyaman-anyaman dalam pelatihan kerja dan mengembangkan ketrampilan dalam menggali potensi sumber daya alam dan manusianya.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim 2002. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. Pembangunan Pemberdayaan perempuan di Kalimantan Timur. Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
- \_\_\_\_\_. 2005. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Hasil Kerjasama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- \_\_\_\_\_. 2006. Pedoman Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat (edisi revisi), Humaniora utama press. Bandung.
- Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta. 2004.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011:100.
- Moleong, J. Lexy. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), PT. Remaja Rosadakarya. Bandung.
- Pedoman Umum Pelaksanaan Model Desa PRIMA. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta. 2007.
- Subarsono, AG, Drs, M.Si, MA, Analisis kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.
- Usman Sunyoto. Dr. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008 :31-32.
- Wignyoebroto, Soetandyo. 2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Paradikma Aksi Metodologi. PT. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta.